

## PENGUSAHA DAN POLITIK: STUDI ATAS PENCALONAN BUPATI RADIAPOH HASIHOLOAN SINAGA PADA PILKADA KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2020

Jhon Mejer Purba<sup>1)</sup>, Aditya Perdana<sup>2)</sup>

Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Indonesia<sup>1,2)</sup>  
E-mail: mejer.jhon@gmail.com<sup>1)</sup>, adperd@gmail.com<sup>2)</sup>

### **Abstrak**

Pemilihan kepala daerah menjadi momen penting dalam proses demokratisasi di Indonesia, termasuk Pilkada serentak tahun 2020 yang melibatkan 270 wilayah. Menurut KPK, sekitar 45% dari total calon bupati berasal dari latar belakang bisnis. Radiapoh Hasiholan Sinaga, seorang pengusaha sukses, berhasil memenangkan Pilkada Kabupaten Simalungun tahun 2020 dengan dukungan koalisi partai politik. Penelitian ini ingin menyelidiki hubungan klientelistik dari partisipasi pebisnis sukses dalam politik, khususnya dalam kasus Radiapoh Hasiholan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dinamika yang muncul ketika pebisnis memasuki politik, mengeksplorasi pertimbangan moral atau utang budi, serta mengidentifikasi dan menganalisis hubungan klientelistik yang terjadi dalam pencalonan Radiapoh Hasiholan sebagai Bupati Kabupaten Simalungun pada Pilkada 2020. Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam untuk memahami perspektif narasumber dan menganalisis hubungan klientelistik dengan menggunakan empat dimensi yang ditetapkan oleh Aspinall dan Berenschot (2019), yang terdiri dari sifat jejaring, pola kontrol sumber daya, sifat sumber daya yang dipertukarkan, serta tingkat intensitas hubungan klientelistik yang terjadi di Kabupaten Simalungun saat pencalonan Radiapoh Hasiholan Sinaga menjadi Bupati Kabupaten Simalungun. Radiapoh Hasiholan Sinaga berhasil menghimpun pendukung dari kelompok partai politik dan non-partai politik; Radiapoh Hasiholan Sinaga kebanyakan menggunakan dana pribadi untuk kampanye; Radiapoh Hasiholan Sinaga menjanjikan beberapa hal untuk kelompok pendukung seperti keterlibatan dalam pemerintahan, kemudahan perizinan, serta dampak tidak langsung seperti coattail effect dan peningkatan pengaruh organisasi di Kabupaten Simalungun; dan drajat intensitas klientelistik pada kontrol diskresi partai yang terjadi di masa kampanye sampai kepemimpinan Radiapoh Hasiholan Sinaga tergolong rendah karena Radiapoh bukan merupakan anggota partai politik sehingga tidak terpusat di satu atau dua partai dan penggunaan sumber dayacenderung ke sumber daya publik mengingat adanya utusan politik dalam pemerintahan Radiapoh Hasiholan Sinaga serta memudahkan perizinan acara organisasi masyarakat yang mendukungnya.

**Kata Kunci:** Pilkada, Klientelisme, Kabupaten Simalungun

### **Abstract**

Local elections are significant moments in the democratization process in Indonesia, including the simultaneous regional elections of 2020 involving 270 regions. According to the Corruption Eradication Commission (KPK), approximately 45% of total regent candidates come from business backgrounds. Radiapoh Hasiholan Sinaga, a successful entrepreneur, won the 2020 Simalungun Regency Regional Elections with the support of a political party coalition. This research aims to investigate the clientelistic relationship arising from the participation of successful businessmen in politics, particularly in the case of Radiapoh Hasiholan. The research objective is to analyze the dynamics that emerge when businessmen enter politics, explore moral considerations or obligations, and identify and

*analyze the clientelistic relationships that occurred in Radiapoh Hasiholan's nomination as Regent of Simalungun Regency in the 2020 Regional Elections. This study will use a qualitative method with in-depth interviews to understand the perspectives of informants and analyze clientelistic relationships using four dimensions set by Aspinall and Berenschot (2019), consisting of network characteristics, patterns of resource control, nature of exchanged resources, and the intensity level of clientelistic relationships that occurred in Simalungun Regency during Radiapoh Hasiholan Sinaga's nomination as Regent. Radiapoh Hasiholan Sinaga successfully gathered support from both political and non-political party groups; Radiapoh Hasiholan Sinaga mostly used personal funds for the campaign; Radiapoh Hasiholan Sinaga promised various benefits to supporter groups such as involvement in governance, ease of licensing, as well as indirect impacts like the coattail effect and increased organizational influence in Simalungun Regency; and the intensity of clientelism on party discretion control during the campaign period to Radiapoh Hasiholan Sinaga's leadership is relatively low because Radiapoh is not a member of a political party, therefore not centralized in one or two parties, and resource usage tends towards public resources due to political emissaries in Radiapoh Hasiholan Sinaga's government facilitating permits for community organization events that support him.*

**Keywords:** *Regional Elections, Clientelism, Simalungun Regency*

## 1. PENDAHULUAN

Secara mendasar, politik dan bisnis merupakan dua domain yang berbeda, beroperasi dalam ruang yang terpisah dengan kepentingan yang berbeda pula. Politik berkaitan dengan perolehan kekuasaan, sementara bisnis berfokus pada perolehan keuntungan ekonomi. Namun, di Indonesia, hubungan antara pengusaha dan politisi telah terjalin sejak lama dalam konteks sejarah politik negara ini. Jatuhnya Presiden Suharto pada tahun 1998 memicu munculnya perdagangan politik yang signifikan (Fukuoka, 2012). Selama masa Orde Baru, pengusaha seringkali memiliki keterkaitan erat dengan pemerintah. Banyak literatur menyatakan bahwa pada masa itu, Suharto berhasil membangun kerajaan politik dan bisnis yang kuat. Beberapa analisis politik menunjukkan bahwa Suharto membangun sebuah bentuk oligarki, di mana kekuasaan politik digunakan untuk mempertahankan kekayaan atau kesejahteraan tertentu, seperti yang dijelaskan oleh Jeffrey Winters (dalam Ford & Pepinsky, 2014).

Kemudian, perubahan politik pasca-jatuhnya rezim Orde Baru membawa perubahan dalam dinamika hubungan antara bisnis dan politik di Indonesia. Meskipun demikian, hubungan antara kedua sektor tersebut tetap relevan dan menjadi fokus utama dalam pemahaman politik dan ekonomi Indonesia modern. Pengusaha dan politisi masih terlibat dalam berbagai bentuk interaksi, termasuk dalam proses pembuatan kebijakan, penentuan regulasi bisnis, dan pengembangan infrastruktur. Dalam beberapa kasus, hubungan ini menciptakan tantangan etis dan mengundang kritik terkait dengan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Selain itu, transformasi ekonomi dan politik yang terus berlanjut di Indonesia telah menghasilkan dinamika baru dalam hubungan antara bisnis dan politik. Pengusaha tidak lagi hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga menjadi pengarah kebijakan dan inovator dalam proses pembangunan ekonomi. Mereka sering kali memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan arah kebijakan publik, baik melalui partisipasi langsung dalam politik maupun melalui pengaruh mereka dalam kelompok kepentingan dan lembaga ekonomi. Sebagai hasil dari perubahan ini, polainteraksi antara bisnis dan politik di Indonesia menjadi semakin kompleks dan sering kali tidak jelas batasnya. Meskipun demikian, pemahaman

yang mendalam tentang hubungan ini menjadi penting dalam mengevaluasi dinamika politik dan ekonomi Indonesia, serta dalam mengembangkan kebijakan yang berkelanjutan dan inklusif.

Robinson dan Hadiz mengungkapkan bahwa politik Indonesia saat ini merupakan kelanjutan dari era Orde Baru. Meskipun Orde Baru berakhir dengan lengsernya Suharto, strukturpendukungnya tetap bertahan dan kuat dalam sistem politik demokrasi multipartai yang terbentuk. Persaingan untuk mengakses sumber daya publik menjadi ciri khas utama dalam politik Indonesia (Widoyoko, 2013). Transisi politik di Indonesia telah menghasilkan pergeseran di mana elit politik-birokrat awalnya memiliki keunggulan atas elit bisnis, tetapi kemudian bisnis merdeka darikendali negara, meskipun akses ke pemerintah tetap menjadi jalan utama untuk mencapai kekayaan. Akibatnya, banyak pengusaha yang beralih ke dunia politik.

Persaingan untuk menguasai sumber daya dan memperoleh keuntungan ekonomi tetap menjadi dorongan utama di balik interaksi antara pengusaha dan politisi. Dalam konteks ini, elit politik dan pengusaha sering kali saling berhubungan dalam bentuk aliansi dan kemitraan yang rumit. Pengusaha, dengan sumber daya dan pengaruh mereka, dapat menjadi kekuatan penting dalam mendukung atau bahkan memengaruhi keputusan politik. Sebaliknya, politisi yang memegang kendali pemerintahan dapat memberikan keuntungan ekonomi kepada pengusaha melalui akses ke sumber daya publik dan peluang bisnis yang menguntungkan. Namun, peran pengusaha dalam politik tidak hanya terbatas pada aspek materiil. Banyak dari mereka juga membawa perspektif dan keahlian manajerial yang berharga ke dalam dunia politik, membantu dalam merancang dan melaksanakan kebijakan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Hubungan antara pengusaha dan politisi ini merupakan domain studi klientelisme. Klientelisme, menurut Hutchcroft (1997: 645), merujuk pada hubungan kekuasaan antara patron dan klien yang umumnya merupakan pertukaran timbal balik, berulang, dan hierarkis. Dalam hubungan ini, patron, yang memiliki kendali atas sumber daya yang dibutuhkan oleh klien, memberikan berbagai jenis dukungan kepada klien sebagai imbalan atas sumber daya tersebut (Hopkin, 2006; Kitschelt et al., 1999; Mainwaring, 1999; Piattoni, 2001; Scott, 1972; Stokes, 2007). Secara tradisional, ketergantungan dalam klientelisme mengacu pada pertukaran sosial di mana patron memberi klien akses ke sarana penghidupan dasar, dan klien memberikan balasan berupa barang dan jasa ekonomi serta tindakan sosial penghormatan dan loyalitas (Muller, 2006: 406). Namun, dalam politik modern, karakter klientelisme telah bergeser menjadi hubungan pertukaran politik dan ekonomi yang lebih kompleks, di mana partai politik, dengan organisasi dan birokrasi yang terstruktur dengan baik, mengambil peran patron tradisional seperti tuan tanah dan tokoh lokal (Muller, 2006: 407).

Istilah "klientelisme" sering digunakan secara bersamaan dengan "patronase" untuk merujuk pada penggunaan atau alokasi sumber daya negara untuk keuntungan politik pribadi atas dasar non-meritokratis (Mainwaring, 1999: 177) atau sebagai studi tentang bagaimana para pemimpin partai menggunakan institusi publik dan sumber daya publik untuk kepentingan mereka sendiri, serta bagaimana bantuan yang beragam dapat ditukar dengan dukungan politik (Weingrod, 1968: 379). Sorauf (1960) menggambarkan patronase sebagai insentif politik dan sistem moneter yang digunakan untuk membeli aktivitas politik dan respon politik. Dia menekankan bahwa meskipun tidak demokratis, patronase dianggap penting bagi partai politik karena membantu mempertahankan organisasi partai yang aktif, meningkatkan kohesi intrapartai, menarik pemilih dan pendukung, mendanai partai dan kandidatnya, mendapatkan tindakan pemerintah yang menguntungkan, serta menciptakan

disiplin partai dalam pembuatan kebijakan. Politisi dalam partai yang mengadopsi sistem klientelistik menggunakan patronase untuk memperkuat pengaruh mereka dan memanipulasi partai untuk kepentingan pribadi mereka, serta memanfaatkan partai tersebut sebagai alat elektoral untuk mencapai jabatan publik (Mainwaring, 1999: 208).

Keterlibatan pengusaha dalam proses politik juga dapat dipahami sebagai strategi untuk mengamankan dan memperluas kepentingan ekonomi mereka di tengah lingkungan politik yang tidak pasti. Dengan memiliki akses langsung ke pembuat kebijakan dan pengambil keputusan, pengusaha dapat memengaruhi keputusan politik yang dapat mempengaruhi kegiatan bisnis mereka. Hal ini dapat mencakup kebijakan perpajakan, peraturan industri, atau pengadaan kontrak pemerintah. Dengan demikian, keterlibatan dalam politik bukan hanya tentang mendukung kandidat tertentu, tetapi juga tentang melindungi dan memajukan kepentingan ekonomi mereka sendiri. Fenomena ini sering disebut oleh Yahya A. Muhaimin sebagai *client-businessman*, yang mengacu pada pengusaha swasta pribumi yang beroperasi di bawah perlindungan dan dukungan jaringan kekuasaan elit politik di dalam pemerintahan (Muhaimin, 1995).

Dalam praktik politik, hubungan saling menguntungkan antara pengusaha dan elit politik di dalam pemerintahan menjadi sebuah fenomena yang umum terjadi. Dinamika ini didorong oleh keberadaan patron-patron politik di kalangan birokrasi yang cenderung mendukung beberapa pengusaha tertentu. Sebagai imbalannya, pengusaha sering kali mendapatkan konsesi dan monopoli yang diberikan oleh pemerintah sebagai bentuk dukungan politik mereka (Muhaimin, 1995). Sebaliknya, dalam urusan bisnis, setiap langkah politik yang diambil oleh elit politik haruslah selaras dengan tujuan untuk menjaga kedaulatan negara dan menguntungkan perekonomian secara keseluruhan. Namun, dalam realitasnya, kesinambungan antara bisnis dan politik seringkali menghasilkan keterlibatan erat antara pengusaha dan dunia politik. Banyak di antara mereka tidak hanya menjadi peserta aktif dalam proses politik, tetapi juga menjadi kontestan politik yang dikenal secara luas oleh masyarakat karena memiliki modal finansial yang kuat dan jaringan politik yang kuat.

Pengusaha terlibat dalam berbagai konteks politik, seperti Pilkada dan pemilihan eksekutif serta legislatif di tingkat lokal dan nasional, karena mereka menyadari bahwa elit politik memiliki peran strategis dalam pembuatan kebijakan publik yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan kecukupan material, pengusaha sering diterima baik oleh masyarakat yang terbiasa dengan budaya politik berbasis uang untuk memobilisasi massa. Menurut Guiheux (2006), pengusaha memiliki hak politik sebagai warga negara biasa, termasuk partisipasi aktif dalam partai politik, karena keseimbangan negara dicapai melalui hubungan seimbang antara pengusaha dan pemerintah. Meskipun keterlibatan pengusaha dalam politik tidak bermasalah secara regulasi, hal ini menimbulkan kekhawatiran, terutama kemungkinan *conflict of interest* jika pengusaha juga menjadi politisi, yang memudahkan perjalanan bisnis mereka.

Kontestasi politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 memiliki calon-calon yang berasal dari dunia bisnis. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam Pilkada tahun 2020, terdapat 665 calon bupati yang memiliki latar belakang dalam bidang bisnis dan sektor swasta, mencakup sekitar 45% dari total jumlah calon bupati. Selain itu, terdapat 555 calon bupati yang berasal dari kalangan birokrat, serta 256 calon legislatif. Kehadiran dominan calon kepala daerah dari kalangan pengusaha atau sektor swasta lainnya juga disebabkan oleh kemampuan finansial mereka yang lebih kuat dibandingkan dengan calon yang memiliki latar belakang dalam bidang legislatif dan birokrasi (Wibowo, 2020). Salah satu pebisnis yang memenangkan kontestasi Pilkada 2020 adalah Radipoh Hasiholan Sinaga yang menjadi Bupati Simalungun terpilih.

Pemilihan kepala daerah Kabupaten Simalungun yang dilaksanakan pada 9 Desember 2020 diikuti oleh empat pasangan calon: tiga diusung partai politik dan satu dari jalur perseorangan. Pasangan nomor urut 1, Radiapoh Hasiholan Sinaga-Zonny Waldi dengan tagline "Rakyat Harus Sejahtera", didukung oleh Partai Golkar, Partai Berkarya, PKS, Partai Hanura, dan Partai Perindo, dan memenangkan Pilkada. Radiapoh adalah pengusaha sukses di Batam, sedangkan Zonny Waldi adalah ASN yang menjabat sebagai Kepala Dinas di Provinsi Sumatera Utara. Pasangan nomor urut 2, Muhajidin Nur Hasim-Tumpak Siregar dengan tagline "Orang Simalungun", didukung oleh Partai Gerindra dan Demokrat. Muhajidin adalah kerabat Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Partai Demokrat, dan Tumpak adalah pengusaha di Simalungun yang sebelumnya mendukung PDI Perjuangan. Pasangan nomor urut 3, Wagner Damanik-Abidinsyah Saragih dengan tagline "WD BISA", maju dari jalur perseorangan. Wagner adalah pensiunan polisi berpangkat Irjen, dan Abidinsyah adalah pengusaha sukses di Simalungun. Pasangan nomor urut 4, Anton Achmad Saragih-Rospita Sitorus dengan tagline "Harus Menang", didukung oleh PDI Perjuangan, PAN, dan Partai Nasdem. Anton adalah pengusaha di Jawa dan abang kandung petahana Bupati, sementara Rospita adalah anggota DPRD Simalungun yang telah menjabat selama tiga periode dari PDI Perjuangan. Sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1 Partai Pengusung dan Jumlah Perolehan Suara Pilkada Simalungun 2020**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusung	Perolehan Suara Sah	Presentase
1	Radiapoh Hasiholan Sinaga, SH - H Zonny Waldi, S.Sos., Mm	Partai Golkar, Perindo, Hanura, PKS dan Berkarya	194.163 suara	42,80%
2	H Muhajidin NurHasim - TumpakSiregar, SH	Gerindra-Demokrat	98.937 suara	21,81%
3	Irjen Pol Purn Drs M. Wagner Damanik, MAp - Abidinsyah Saragih	Jalur Perseorangan	32.926 suara	7,26%
4	Dr H Anton Achmad Saragih - Ir Rospita Sitorus	PDIP, Nasdem dan PAN	127.608 suara	28,13%

Sumber: [pilkada2020.kpu.go.id](http://pilkada2020.kpu.go.id)

Dari gambaran latar belakang yang telah dijelaskan di atas, terlihat bahwa Pilkada 2020 di Kabupaten Simalungun menampilkan kombinasi antara figur lama dan baru dalam persaingan politiknya. Sejumlah aliansi dan koalisi politik terbentuk untuk mendukung masing-masing pasangan calon yang bertanding pada saat itu. Salah satu figur yang menonjol dalam pemilihan tersebut adalah Radiapoh Hasiholan Sinaga, yang berhasil terpilih sebagai Bupati Kabupaten Simalungun. Radiapoh, seorang pengusaha yang telah lama aktif dalam dunia bisnis, memutuskan untuk merambah ke dunia politik, dan bersama dengan pasangannya, Zonny Waldi, berhasil memenangkan Pilkada 2020 dengan mengalahkan tiga pasangan calon lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menggali faktor-faktor apa yang mendorong seseorang seperti Radiapoh Hasiholan Sinaga untuk beralih ke arena politik dari dunia bisnisnya yang sebelumnya telah sukses.

## 2. TINJAUAN TEORITIS

Dalam praktik klientelisme, keputusan terkait penunjukan posisi publik, pemberian kontrak negara, lisensi, dan konsesi tidak selalu didasarkan pada pertimbangan efisiensi atau kompetensi, tetapi lebih sering bergantung pada hubungan pribadi dan politik tertentu.

Proses pengambilan keputusan ini melanggar prinsip meritokrasi, yang seharusnya memberikan kesempatan kepada individu atau kontraktor yang paling efisien dan mampu melalui proses tender terbuka. Menurut Mainwaring (1999), klientelisme dianggap sebagai mekanisme yang tidak produktif dalam alokasi sumber daya negara, yang pada akhirnya melemahkan kinerja sektor publik. Meskipun biaya langsung dari setiap kasus spesifik penggunaan patronase untuk membangun dukungan politik mungkin tidak signifikan, namun dampak keseluruhan adalah terciptanya sistem insentif yang lebih mengedepankan pertimbangan politik dan hubungan pribadi. Hal ini mengakibatkan efisiensi, kualitas, dan prestasi sering menjadi prioritas kedua. Sistem insentif semacam ini tidak mendukung kemakmuran ekonomi atau prinsip rasionalitas birokrasi Weberian (Mainwaring, 1999: 210).

Menurut Aspinall dan Berenschot (2019), para calon yang bersaing untuk posisi politik, terutama di tingkat eksekutif, sering kali menjanjikan peningkatan pembangunan, peningkatan kualitas kinerja birokrasi, dan perbaikan pelayanan kesehatan serta sosial. Mereka juga mencatat perkembangan dramatis dalam berbagai program kesejahteraan. Dalam studi klientelistik ini, terdapat empat dimensi yang dianalisis, yaitu (Aspinall & Berenschot, 2019):

**Dimensi pertama** adalah sifat jejaring yang digunakan untuk mendistribusikan sumber daya patronase. Ini melibatkan analisis terhadap sejauh mana jejaring ini terinstitusionalisasi dan seberapa kuat ikatannya. Kompetisi politik yang ketat menyoroti pentingnya membangun jejaring non-partai sebagai sumber daya kampanye dalam pemilihan umum. Setelah terlibat dalam distribusi keuntungan, para calon sering menghadapi tantangan dari jejaring yang telah dibangun. Ini meliputi tim sukses ad hoc yang dibentuk oleh calon dan infiltrasi jejaring formal dan informal untuk memengaruhi pemilih berdasarkan kriteria seperti agama, etnisitas, dan hubungan personal. Kedua hal ini terkait dengan bagaimana calon menjaga loyalitas jejaring melalui pembagian keuntungan yang saling menguntungkan.

**Dimensi kedua** adalah pola kontrol terhadap sumber daya dan manfaat yang disediakan oleh negara. Menurut Aspinall dan Berenschot (2019), untuk berhasil dalam praktik klientelisme, seorang politisi harus mampu memberikan balasan kepada komunitas yang telah mendukungnya. Tujuan utama partai politik adalah mengendalikan sumber daya negara, baik untuk kepentingan umum maupun partai itu sendiri. Dalam beberapa kasus, partai politik di Indonesia juga harus bersaing dengan jejaring informal di luar partai.

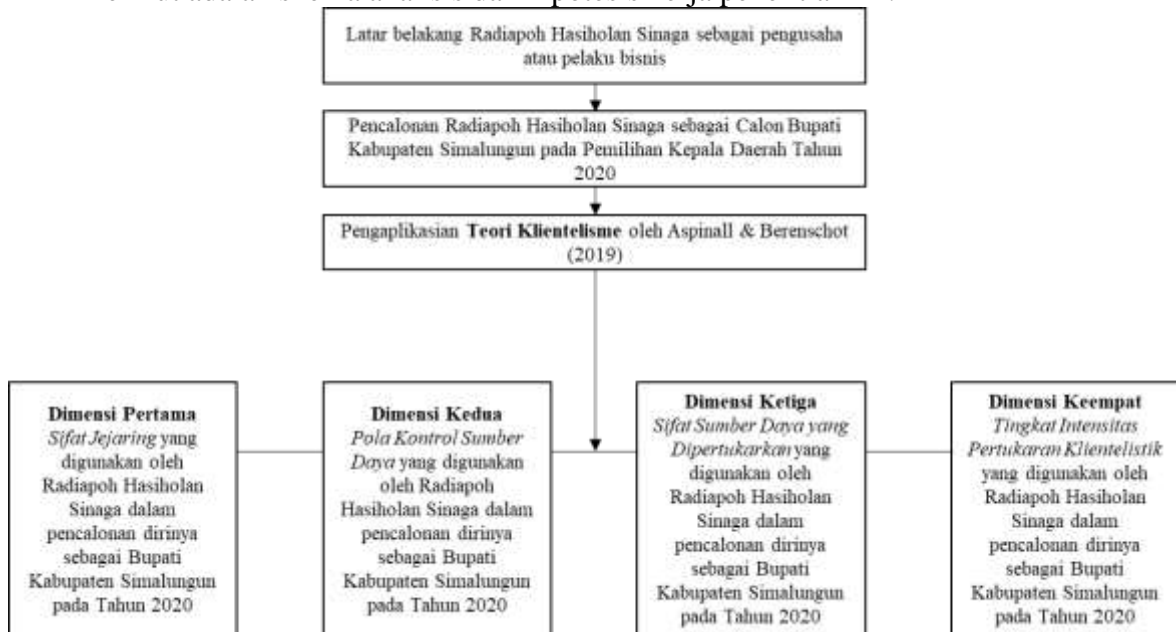
**Dimensi ketiga** adalah analisis tentang sifat sumber daya yang dipertukarkan untuk mendapatkan dukungan politik. Ini melibatkan penerima dan jenis barang yang diberikan. Pertukaran ini dimaksudkan untuk mendapatkan suara atau memobilisasi massa. Aspinall dan Berenschot (2019) menyebut hubungan ini sebagai "klientelisme relasional" karena lebih berkelanjutan daripada pertukaran sekali-selesai.

**Dimensi keempat** adalah mengukur tingkat intensitas klientelisme pada kontrol diskresi partai dan sumber daya yang digunakan. Ini mencakup apakah kontrol tersebut tinggi atau rendah, dan apakah sumber dayanya bersifat publik atau privat.

Peneliti akan menggunakan teori klientelisme ini untuk menganalisis kasus pencalonan Radiapoh Hasiholan Sinaga sebagai Bupati Kabupaten Simalungun pada tahun 2020. Peneliti akan mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam kemenangan Radiapoh Hasiholan Sinaga. Setelah itu, peneliti akan menganalisis hubungan klientelistik tersebut dengan menggunakan empat dimensi yang disebutkan oleh Aspinall dan Berenschot (2019), yaitu *sifat jejaring yang digunakan, pola kontrol terhadap sumber daya, sifat sumber daya yang dipertukarkan, serta tingkat intensitas pertukaran klientelistik.*

### 3. METODE PENELITIAN

Berikut adalah skema analisis dan hipotesis kerja penelitian ini:



Gambar 1.1 Skema Analisis

Berdasarkan skema analisis di atas, hipotesis kerja dari penelitian ini adalah:

1. Sifat jejaring yang digunakan oleh Radiapoh Hasiholan Sinaga dalam pencalonannya di Pilkada 2020 berasal dari kelompok partai dan non-partai.
2. Pola kontrol sumber daya yang dilakukan oleh Radiapoh Hasiholan Sinaga dalam pencalonannya di Pilkada 2020 berasal dari kantong pribadi mengingat latar belakangnya sebagai pebisnis dan bukan merupakan calon petahana.
3. Sifat sumber daya yang dipertukarkan oleh Radiapoh Hasiholan Sinaga dalam pencalonannya di Pilkada 2020 diperuntukkan untuk mengambil suara.
4. Tingkat intensitas hubungan klientelistik dalam pencalonan Radiapoh Hasiholan Sinaga sebagai Bupati Kabupaten Simalungun rendah secara diskresi partai politik dan sumber daya yang digunakan adalah privat mengingat latar belakang Radiapoh Hasiholan sebagai pebisnis dan bukan merupakan calon petahana.

Penelitian ini akan menerapkan metode penelitian kualitatif dengan tujuan untuk mengidentifikasi pola perilaku peserta atau pelaku, sehingga memungkinkan peneliti untuk memahami makna suatu fenomena dari sudut pandang mereka (Creswell, 2003). Alasan pemilihan metode kualitatif adalah karena penelitian ini bertujuan untuk mendalami hubungan klientelistik dalam pencalonan Radiapoh Hasiholan Sinaga sebagai Bupati Kabupaten Simalungun pada Pilkada 2020. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, peneliti dapat memahami perspektif narasumber mengenai hubungan klientelistik tersebut. Metode ini sangat relevan untuk menggali wawasan mendalam tentang bagaimana interaksi antara pengusaha dan elit politik terjadi, serta bagaimana hubungan tersebut mempengaruhi dinamika politik lokal.

Untuk teknis pengumpulan data, peneliti akan menggunakan metode wawancara mendalam dengan pertanyaan terbuka untuk mendapatkan informasi yang mendalam dari perspektif narasumber (Creswell, 2003). Wawancara mendalam memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pemikiran, perasaan, dan pengalaman narasumber secara detail, sehingga mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika klientelisme

dalam kampanye politik Radiapoh Hasiholan Sinaga. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin memperoleh perspektif pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pencalonan Radiapoh, seperti anggota tim pemenangan, relawan, dan mungkin juga lawan politiknya. Melalui wawancara mendalam, peneliti dapat menggali bagaimana strategi klientelistik diterapkan dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi hasil pemilihan. Selain wawancara, peneliti juga akan melakukan observasi partisipatif untuk memperoleh data kontekstual mengenai hubungan klientelistik yang ada. Observasi ini memungkinkan peneliti untuk melihat langsung interaksi antara pengusaha dan politisi dalam berbagai kegiatan kampanye, sehingga dapat memahami dinamika sosial dan politik yang terjadi di lapangan. Dengan menggabungkan wawancara dan observasi, peneliti berharap dapat mendapatkan data yang lebih kaya dan mendalam mengenai hubungan klientelistik dalam pencalonan Radiapoh.

Pendekatan kualitatif ini dipilih karena peneliti ingin menganalisis empat dimensi dalam teori klientelisme yang dikemukakan oleh Aspinall & Berenschot, yaitu intensitas kontrol diskresi, sumber daya yang digunakan, mekanisme distribusi manfaat, dan tingkat ketergantungan penerima manfaat. Dengan memahami perspektif narasumber dan mengamati langsung interaksi yang terjadi, peneliti dapat mengevaluasi sejauh mana teori tersebut berlaku dalam konteks lokal di Kabupaten Simalungun. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dinamika politik lokal dan peran pengusaha dalam proses politik di Indonesia. Sejumlah informan telah ditetapkan sebagai target narasumber penelitian untuk memperoleh informasi yang relevan, yaitu:

**Tabel 1.2 Matriks Informan**

<b>No.</b>	<b>Informan</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Informasi yang Diperoleh</b>
1.	Radiapoh Hasiholan Sinaga, S.H., M.H.	Bupati Kabupaten Simalungun	1. Mengetahui sifat jejaring yang dimiliki Radiapoh Hasiholan Sinaga 2. Mengetahui pola kontrol sumber daya oleh Radiapoh Hasiholan Sinaga 3. Mengetahui sifat sumber daya yang dipertukarkan oleh Radiapoh Hasiholan Sinaga dengan kelompok pendukungnya
2.	Timbul Jaya Sibarani	Ketua DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Simalungun	1. Mengetahui sifat sumber daya yang dipertukarkan oleh Radiapoh Hasiholan Sinaga dengan Partai Golkar sebagai kelompok Partai Politik
3.	El Kananda Shah	Ketua Pemuda Pancasila (PP) Simalungun	1. Mengetahui sifat sumber daya yang dipertukarkan oleh Radiapoh Hasiholan Sinaga dengan PP sebagai kelompok non-partai politik
4.	Mangihut Sinaga	Ketua Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dohot Boru (PPTSB)	1. Mengetahui sifat sumber daya yang dipertukarkan oleh Radiapoh Hasiholan Sinaga dengan PPTSB sebagai kelompok non-partai politik
5.	Rikanson Jutamardi	Pengamat Pilkada Kabupaten Simalungun	1. Mengetahui tingkat intensitas hubungan klientelistik yang terjadi pada saat pencalonan Radiapoh Hasiholan Sinaga pada Pilkada 2020 di Kabupaten Simalungun

Penelitian ini juga akan memanfaatkan metode analisis data sekunder, yang merupakan proses menganalisis data yang telah ada tanpa perlu melakukan wawancara, survei, kuesioner, observasi, atau pengumpulan data primer lainnya. Data sekunder



merupakan sumber informasi yang diperoleh dari studi literatur, artikel, jurnal, dan situs web yang relevan dengan topik penelitian (Sugiyono, 2009). Untuk mengumpulkan jenis data ini, peneliti dapat melakukan kunjungan ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip, atau membaca berbagai buku yang relevan dengan penelitian (Maulidi, 2016).

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Radiapoh Hasiholan Sinaga (RHS), seorang pengusaha sukses, memenangkan Pilkada Kabupaten Simalungun 2020 bersama pasangannya Zonny Waldi. RHS, yang memiliki latar belakang sebagai anak petani, merasa terpanggil untuk mengabdikan diri dan membawa perubahan bagi daerah asalnya. Sebagai Bupati Simalungun sejak April 2021, RHS berharap pengalaman dan prestasinya di dunia bisnis dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Simalungun, mengatasi tantangan masa kecilnya yang penuh perjuangan di pedesaan. Meskipun menghadapi tantangan politik yang besar, RHS yakin bahwa dengan visi yang jelas dan program-program konkret, ia dapat membawa perubahan positif di Simalungun. Kepemimpinannya ditandai dengan fokus pada peningkatan infrastruktur, kualitas hidup masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi. Kemenangan pasangan RHS-ZW mencerminkan kebutuhan masyarakat Simalungun akan figur baru yang dapat membawa perubahan, serta kemampuan mereka untuk membangun aliansi yang kuat dengan berbagai partai politik lokal.

Kabupaten Simalungun memiliki sejarah politik yang dinamis, terutama dengan kehadiran tokoh-tokoh seperti JR Saragih yang mendominasi pemilihan sebelumnya. Namun, perubahan kepemimpinan di Pilkada 2020 menunjukkan adanya pergeseran kekuatan politik. RHS-ZW mendapatkan dukungan luas dari berbagai partai politik, termasuk Partai Golkar, Hanura, PKS, Berkarya, dan Perindo, yang membantu mengamankan kemenangan mereka. Strategi kampanye RHS-ZW yang efektif dan dukungan dari kelompok-kelompok masyarakat, seperti Forum Komunikasi Nusantara untuk Warga Jawa (FKWJ) dan Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dohot Boru (PPTSB), memainkan peran penting dalam kesuksesan mereka. Dukungan dari FKWJ menunjukkan bahwa pasangan ini berhasil merangkul berbagai elemen masyarakat Simalungun, sementara hubungan erat dengan PPTSB mencerminkan keterlibatan langsung dan pemahaman RHS terhadap komunitas lokal.

#### **Pembahasan**

Dalam menganalisis implementasi teori klientelisme Aspinall & Berenschot (2019) dalam kasus Radiapoh Hasiholan Sinaga sebagai calon Bupati Kabupaten Simalungun pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020, terlihat bahwa Radiapoh berhasil membangun jejaring yang luas dan kuat di wilayah tersebut. Jejaring ini tidak hanya terbatas pada kelompok partai politik, tetapi juga merambah ke kelompok non-partai yang memiliki pengaruh signifikan, menunjukkan kesadaran akan pentingnya dukungan dari sektor ini. Ini mencerminkan strategi inklusif Radiapoh untuk menggabungkan berbagai kepentingan masyarakat dalam upaya politiknya. Selain itu, Radiapoh menunjukkan pemahaman yang matang tentang dinamika politik dengan menggunakan sumber daya pribadi, dukungan partai politik, dan upaya penggalangan dana dari masyarakat dalam kampanyenya.

Radiapoh Hasiholan Sinaga berhasil menghimpun pendukung dari beragam latar belakang, baik dari kelompok partai politik maupun non-partai politik, menunjukkan kemampuannya untuk menjalin aliansi strategis yang luas. Dalam dunia politik yang kompleks, kemampuan untuk membangun koneksi lintas sektor ini menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam memperoleh dukungan yang kuat. Penggunaan dana pribadi untuk kampanye menunjukkan tingkat kemandirian Radiapoh sebagai kandidat. Dengan memiliki

sumber daya finansial yang kuat, Radiapoh dapat lebih fleksibel dalam mengambil keputusan kampanye tanpa harus terlalu menggantungkan diri pada sumber daya eksternal.

Selain membangun aliansi yang kuat, Radiapoh juga memperlihatkan komitmen untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi berbagai kelompok pendukungnya. Janji untuk memberikan keterlibatan dalam pemerintahan dan kemudahan perizinan menunjukkan kesediaannya untuk memberikan kontribusi yang nyata dalam memajukan agenda-agenda yang diinginkan oleh para pendukungnya. Hal ini bukan hanya mencerminkan politik praktis, tetapi juga menunjukkan kepemimpinan yang responsif dan terbuka terhadap aspirasi masyarakat. Kemampuan Radiapoh untuk membangun hubungan yang solid dengan berbagai kelompok pendukungnya bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Dalam sebuah kontes politik, memiliki basis pendukung yang kuat merupakan aset berharga yang dapat memengaruhi hasil pemilihan. Dengan menjalin aliansi strategis yang luas dan menawarkan solusi konkret untuk memenuhi kebutuhan pendukungnya, Radiapoh mampu membangun fondasi yang kokoh untuk mendukung kampanye politiknya.

Dukungan politik yang diberikan kepada Radiapoh tidak hanya memiliki dampak langsung pada hasil pemilihan, tetapi juga menimbulkan efek coattail yang memengaruhi struktur politik dan sosial Kabupaten Simalungun secara lebih luas. Efek coattail mengacu pada fenomena di manapopularitas atau kemenangan seorang kandidat berkontribusi pada kesuksesan kandidat lain dari partai yang sama atau kelompok politik yang serupa. Dalam konteks ini, dukungan yang diberikan oleh partai politik dan kelompok masyarakat kepada Radiapoh dapat mempengaruhi persepsi dan preferensi pemilih terhadap kandidat lain yang terkait atau terafiliasi dengannya.

Selain efek coattail, dukungan yang diberikan juga dapat memperkuat pengaruh organisasi di Kabupaten Simalungun. Organisasi politik atau masyarakat yang mendukung Radiapoh dapat melihat peningkatan dalam legitimasi dan kekuatan politik mereka sebagai hasil dari kemenangan atau kesuksesan Radiapoh. Hal ini bisa mengubah dinamika kekuasaan di tingkat lokal, dengan organisasi-organisasi tersebut memperoleh posisi yang lebih dominan atau diakui dalam proses pengambilan keputusan politik. Dengan demikian, dukungan politik kepada Radiapoh tidak hanya menguntungkan secara langsung bagi kandidat tersebut, tetapi juga memberikan dampak yang lebih luas dalam struktur politik dan sosial di Kabupaten Simalungun.

Kehadiran Radiapoh yang independen dari afiliasi partai politik memberinya keuntungan dalam hal fleksibilitas dan aksesibilitas sumber daya publik. Sebagai seorang yang tidak terikat dengan keanggotaan partai politik tertentu, Radiapoh memiliki kebebasan untuk menggunakan sumber daya publik tanpa terlalu dibatasi oleh agenda atau kepentingan partai. Hal ini memungkinkannya untuk lebih mudah memanfaatkan fasilitas negara dan mendapatkan dukungan administratif yang mungkin sulit diakses bagi kandidat yang terikat dengan partai tertentu.

Kemampuan Radiapoh untuk memanfaatkan sumber daya publik ini juga memudahkan akses bagi organisasi masyarakat yang mendukungnya. Karena tidak memiliki ketergantungan yang kuat pada partai politik, Radiapoh dapat lebih inklusif dalam membangun hubungan dengan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat. Hal ini menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan inklusif, di mana berbagai kelompok dapat berpartisipasi dalam proses politik tanpa terhalang oleh pertimbangan partisan.

Dengan demikian, Radiapoh mampu membangun hubungan yang inklusif dan beragam dengan berbagai pihak, tanpa harus terlalu bergantung pada struktur partai politik tradisional..

Kehadirannya yang independen memungkinkannya untuk lebih leluasa dalam memanfaatkan sumber daya publik dan memfasilitasi akses bagi organisasi masyarakat yang mendukungnya. Hal ini mencerminkan dinamika politik yang berubah di mana kandidat independen atau non-partisan dapat memainkan peran yang signifikan dalam konteks pemilihan kepala daerah.

## **5. SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Dalam analisis pelaksanaan teori klientelisme yang disusun oleh Aspinall & Berenschot (2019), terhadap kasus partisipasi Radiapoh Hasiholan Sinaga sebagai calon Bupati Kabupaten Simalungun dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020, tampak jelas bahwa Radiapoh mampu menjalin hubungan yang kokoh dan luas di wilayah tersebut. Jejaring yang berhasil dibangunnya tidak hanya terbatas pada kelompok partai politik, namun juga mencakup kelompok-kelompok non-partai yang memiliki pengaruh yang signifikan, menggambarkan kesadaran Radiapoh akan pentingnya dukungan dari berbagai sektor dalam masyarakat. Radiapoh juga menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang dinamika politik dengan memanfaatkan sumber daya pribadi, dukungan dari partai politik, serta usaha penggalangan dana dari masyarakat dalam rangkanya.

Pada dimensi pertama analisis tersebut, Radiapoh berhasil mengumpulkan dukungan dari berbagai kelompok, baik dari partai politik maupun non-partai politik. Dalam kampanyenya, Radiapoh mayoritas menggunakan dana pribadi dan menjanjikan beberapa keuntungan kepada pendukungnya, seperti keterlibatan dalam pemerintahan, kemudahan dalam perizinan, serta dampak tidak langsung seperti efek coattail dan peningkatan pengaruh organisasi di Kabupaten Simalungun. Meskipun begitu, tingkat intensitas klientelistik dalam pengendalian diskresi partai politik yang terjadi selama kampanye hingga masa kepemimpinan Radiapoh cenderung rendah, dikarenakan ia bukan merupakan anggota partai politik yang terkonsentrasi di satu atau dua partai. Lebih lanjut, penggunaan sumber daya cenderung bersifat publik mengingat adanya utusan politik dalam pemerintahan Radiapoh serta kemudahan perizinan acara organisasi masyarakat yang mendukungnya.

Dapat disimpulkan bahwa Radiapoh Hasiholan Sinaga berhasil memanfaatkan berbagai aspek teori klientelisme untuk membangun dukungannya dalam pemilihan kepala daerah. Dengan membangun jejaring yang luas, memanfaatkan sumber daya pribadi, dan mendapat dukungan dari partai politik, ia berhasil memenangkan pemilihan tersebut. Meskipun tingkat kontrol dari partai politik dan sumber daya yang digunakan cenderung rendah, Radiapoh mampu mempertahankan posisinya dan membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat dan pemerintahan setempat. Hal ini menunjukkan kompleksitas dan dinamika dalam hubungan antaradunia bisnis dan politik dalam konteks demokrasi Indonesia.

Radiapoh Hasiholan Sinaga membuktikan bahwa keterlibatan seorang pengusaha sukses dalam dunia politik tidak hanya tentang keunggulan finansial semata, tetapi juga melibatkan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan dinamika masyarakat serta kemampuan untuk membangun jejaring yang kuat di berbagai sektor. Melalui analisis kasus ini, kita dapat melihat bagaimana seorang pengusaha sukses dapat memanfaatkan kekuatan ekonomi dan politiknya untuk mencapai tujuan politiknya, serta bagaimana kompleksitas hubungan antara politik, bisnis, dan masyarakat dapat memengaruhi proses demokrasi di tingkat lokal maupun nasional.

Penting untuk dipahami bahwa hubungan antara bisnis dan politik bukanlah sesuatu yang statis atau bersifat satu arah. Sebaliknya, hubungan tersebut dapat berubah dan berkembang seiring waktu, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perubahan politik,

ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus memantau dan menganalisis dinamika tersebut agar dapat memahami bagaimana hubungan tersebut memengaruhi kehidupan politik dan ekonomi kita.

Dari kasus Radiapoh Hasiholan Sinaga, kita juga dapat belajar tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses politik. Meskipun Radiapoh berhasil memenangkan pemilihan kepala daerah dengan dukungan yang kuat dari berbagai sektor, tetapi masih ada pertanyaan tentang bagaimana penggunaan sumber daya pribadinya memengaruhi integritas dan kemandirian politiknya. Peneliti rasa penting untuk terus memantau dan mengevaluasi praktik politik kita agar dapat memastikan bahwa mereka berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.

### **Saran**

Studi Lanjutan tentang Hubungan Klien dan Jejaring Politik: Meskipun telah diketahui bahwa Radiapoh berhasil membangun jejaring politik yang kuat, penelitian lanjutan dapat menjelajahi lebih dalam tentang hubungan klien yang spesifik antara Radiapoh dan kelompok pendukungnya. Analisis lebih mendalam tentang bagaimana Radiapoh membangun dan memelihara hubungan ini, serta bagaimana hubungan tersebut memengaruhi keputusan politiknya, dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang praktik klientelisme dalam konteks lokal.

Pengaruh Sumber Daya Pribadi dalam Politik: Studi lebih lanjut dapat mengeksplorasi dampak penggunaan sumber daya pribadi oleh kandidat politik seperti Radiapoh. Penelitian ini dapat menyoroti bagaimana penggunaan sumber daya pribadi, termasuk kekayaan pribadi, dapat memengaruhi proses politik dan representasi demokratis. Ini juga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kandidat dengan latar belakang ekonomi yang kuat dapat memanfaatkan kekayaan mereka untuk memenangkan pemilihan politik.

Komparasi dengan Kasus Lain: Untuk memahami lebih lanjut tentang praktik klientelisme dan partisipasi bisnis dalam politik, penelitian bisa membandingkan kasus Radiapoh dengan kasus-kasus lain di Indonesia atau negara-negara lain. Ini dapat membantu mengidentifikasi pola umum atau perbedaan dalam praktik politik antara berbagai konteks politik dan ekonomi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alamudi, Arifin Al. (13 Feb 2023). *Mengenal Radiapoh Sinaga, Anak Petani yang Jadi Bupati Simalungun*. Diakses melalui <https://sumut.idntimes.com/news/sumut/arifin-alamudi/mengenal-radiapoh-sinaga-anak-petani-yang-jadi-bupati-simalungun?page=all>
- Andrain, Charles. (1992). *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wasana.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the State in Indonesia*. Cornell University Press. Diakses melalui <https://books.google.co.id/books?id=qvqTDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false> (5 November 2022).
- Azhar, M. A. (2012). Relasi Pengusaha-Penguasa Dalam Demokrasi: Fenomena Rent Seeker Pengusaha jadi Penguasa. *Publica*, 2(1). Diakses dari <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/publica/article/view/403>
- Chandra, A. I. (2009). Pentingnya Perusahaan Mengelola Hubungan Baik dan Fungsional dengan Pemangku Kepentingan. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 5(2). Diakses dari

<http://journal.unpar.ac.id/index.php/JurnalAdministrasiBisnis/article/download/2113/1923>

- Chilcote, Ronald. (2003). *Teori Pembangunan Politik: Penelusuran Paradigma*. Jakarta: RajawaliPers.
- Creswell, J. W. (2003). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 2nd ed.* California: SAGE Publications.
- Dodi, S. (2011). *Pengusaha Dan Politik: Keterlibatan Pengusaha Dalam Dunia Politik Di Sumatera Barat 1999–2009* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas). Diakses dari <http://scholar.unand.ac.id/1686>
- Fh, Asep Abdul Sahi, *Pengusaha dan Politik : Studi Kasus Atas Aktivitas Politik Aburizal Bakrie Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2004* (Jakarta: Tesis PPs Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia, 2005)
- Ford, Michele & Pepinsky, Thomas. (2014). *Beyond Oligarchy (ed)*. USA: Cornell Southeast Asia.
- Fukuoka, Yuri. (2012). Politics, Business, and The State in Post Soeharto, *Contemporary Southeast Asia*, 34(1), hal. 81.
- Gaffar, A. (2016). Hubungan Patron Client Dan Konsekuensinya Terhadap Lainnya Pengusaha Indonesia: Review Buku Dr. Yahya Muhaimin. *Unisia*, (10), 83-90. Diakses dari <https://journal.uui.ac.id/Unisia/article/download/5170/4615>
- Guiheux, G. (2006). The political "participation" of entrepreneurs: challenge or opportunity for the Chinese communist party?. *Social Research*, 219-244.
- Hagopian, F. (2007). Party and voters in emerging democracies. In Boix, C & Stokes, S. (Ed.), *The Oxford Handbook of Comparative Politics* (pp. 582-603). New York: Oxford University Press.
- Hidayat, M. S., & Wardani, S. B. E. (2022). Politik Kekerabatan dan Praktik Klientelistik Keluarga Jayabaya di Lebak dan Keluarga Iskandar di Kabupaten Tangerang. *The Journalish: Social and Government*, 3(2), 75-87.
- Hopkin, J. (2006). Clientelism and party politics. In Katz, R.S & Crotty, W. (Ed.), *Handbook of party politics*. (pp. 406-412). London: Thousand Oaks, California: SAGE.
- Huntington, Samuel P & Nelson, Joan M. (1984). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*.
- Hutchcroft, P. D. (1997). The politics of privilege: Assessing the impact of rents, corruption, and clientelism on third world development. *Political Studies*, 45(3), 639–658. doi:10.1111/1467-9248.00100 Jakarta: Sangkala Pulsar.
- Kitschelt, H. (2000). Linkages between citizens and politicians in democratic polities. *Comparative Political Studies*, 33(6-7), 845–879. <http://doi.org/10.1177/001041400003300607>
- Kitschelt, H., Markowski, M., Toka. (1999). *Post-communist party systems: Competition, representation, and inter-party cooperation*. New York: Cambridge University Press.
- Komarudin, U., & Pramuji, P. (2023). Between Clientelism And Patrimonialism: Local Politics Of The Philippines And Indonesia. *Jurnal Wacana Politik* Volume, 8(1).
- Komarudin. (1992). *Ensiklopedi Manajemen*. Jakarta: Bina Aksara
- Magribi, Alija. (10 Des 2020). *Profil Radiapoh Sinaga, Pengusaha Sukses Berharta Rp 11 Miliar, Hampir Menyerah karena Malaria*. Diakses melalui <https://medan.tribunnews.com/2020/12/10/profil-radiapoh-sinaga-pengusaha-sukses-berharta-rp-11-miliar-hampir-menyerah-karena-malaria?page=2>
- Mainwaring, S. (1999). *Rethinking party systems in the Third Wave of democratization: The case of Brazil*. Stanford University Press.

- Mas'ood, Mohtar, *Ekonomi dan Struktur Politik: Orde Baru 1966-LP3ES*, 1989).
- Maulidi, A. (2016). Pengertian Data Primer dan Data Sekunder. Diakses melalui <https://www.kanalinfo.web.id/2016/10/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder.html> pada 15 Maret 2022 pukul 20.00 WIB
- Muller, W., C. (2006). Party patronage and party colonization of the state. In Katz, R. S., & Crotty,
- Pasaribu, I. (2017). Pilkada Serentak Dan Hukum Politik: Kontroversi Kebijakan Pemerintah Pusat Terkait Putusan Hukum Pilkada Kabupaten, Simalungun Sumatera Utara Tahun 2015. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 8(1), 82-91.
- Piattoni, S. (2001). Clientelism, interests, and democratic representation: The European experience in historical and comparative perspective. Cambridge"; New York: Cambridge University Press.
- Pinem, W. (2022). Ethnic Crossing Politics as a Political Strategy for the Winning Candidate Pair Radiapoh Hasiholan Sinaga & Zonny Waldi in the 2020 Simalungun Regent Election. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 7(1), 160-174.
- Political Dictionary. (N.d.). *Coattail Effect*. Diakses melalui <https://politicaldictionary.com/words/coattail-effect/> (25 Februari 2024)
- Robison, Richard & Haditz, Vedi R. (2004). *Reorganising Power in Indonesia; The Politics of Oligarchy in An Age of Markets*. London: Routledge Curzon.
- Scott, J. C. (1972). Patron-client politics and political change in Southeast Asia. *American Political Science Review*, 66(01), 91–113. <http://doi.org/10.2307/1959280>
- Scumpater, Joseph. (1954). *History of Economic Analysis*. New York: Oxford University Press.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Solihah, R. (2016). Pola relasi bisnis dan politik di Indonesia masa reformasi: Kasus rent seeking. *Jurnal Wacana Politik*, 1(1), 41-52. Diakses dari <http://jurnal.unpad.ac.id/wacanapolitik/article/view/10546>
- Sulistyo, Hermawan & Kadar, A. (2000). *Uang & Kekuasaan Dalam Pemilu 1999*. Jakarta: KIPPI Indonesia.
- Surbaki, Ramlan. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Tamara, Nasir. (1998). *Aburizal Bakrie; Bisnis dan Pemikirannya*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Tanter, R. (1996). *Politik kelas menengah Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Tara, Azwir Dainy. (2002). *Peran Pengusaha dalam Membangun Demokrasi*. Jakarta: Nuansa Madani.
- Taufik, Muhammad, Hubungan Kepentingan Pengusaha dan Penguasa Dalam Bisnis Pers: Studi Kasus Bisnis Pers Group Bakrie (Jakarta: Tesis PPs Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia, 2002)
- Varma, SP. (1999). *Teori Politik Modern*. Jakarta: Rajawali Perss.
- W. J. (Ed.), *Handbook of Party Politics*. (pp. 189-195). SAGE.
- Weingrod, A. (1968). Patrons, patronage, and political parties. *Comparative Studies in Society and History*, 10(04), 377–400. <http://doi.org/10.1017/S0010417500005004>
- Wibowo, Eko Ari. (2020, 4<sup>th</sup> Dec). *Ini Alasan Calon di Pilkada 2020 Didominasi Pengusaha*, Tempo Eksklusif. Diakses pada <https://nasional.tempo.co/read/1411613/ini-alasan-calon-di-pilkada-2020-didominasi-pengusaha> tanggal 14 Oktober 2022
- Widoyoko, J. D. (2018). Politik, Patronase dan Pengadaan. *Jurnal Integritas KPK*, 4. Diakses dari <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/200>
- Widoyoko, J. Danang. (2013). *Oligarki dan Korupsi Politik Indonesia*. Malang: Setara Press